

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Tulus Mampetua Lumban Gaol (2310622011), Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad

Ahsin Thohari

Pemalsuan ijazah telah menjadi masalah serius yang berdampak luas, baik bagi individu yang terlibat langsung maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari tindakan ini sangat merugikan, antara lain mengganggu integritas sistem pendidikan, merusak reputasi lembaga pendidikan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia kerja dan pendidikan. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelaku perseorangan, tetapi juga melibatkan organisasi/penyelenggara pendidikan yang secara sadar menerbitkan atau memfasilitasi dokumen palsu tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik oleh individu maupun organisasi/ penyelenggara pendidikan, serta menelaah disparitas antara norma hukum yang ideal (*das Sollen*) dengan implementasinya dalam praktik (*das Sein*). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen khususnya ijazah telah tersedia dan memadai, akan tetapi terdapat ketimpangan yang signifikan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum dalam kasus pemalsuan ijazah dimana penegak hukum lebih cenderung menasar pelaku secara individu dan melepaskan organisasi/ penyelenggara pendidikan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Kriminal; Pertanggungjawaban Hukum; Pemalsuan; Ijazah.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL POLICY AND LEGAL ACCOUNTABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF FORGERY OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION CERTIFICATES**

Tulus Mampetua Lumban Gaol (2310622011), Handar Subhandi Bakhtiar, Ahmad

Ahsin Thohari

*Diploma forgery has emerged as a serious and widespread issue, adversely affecting both individuals directly involved and the broader society. The consequences of such acts are significantly harmful, including the undermining of the integrity of the educational system, the tarnishing of the reputation of educational institutions, and the creation of inequality and injustice in both educational and employment sectors. This phenomenon involves not only individual offenders, but also organization/educational institutions that knowingly issue or facilitate forged diplomas without any legitimate legal basis. This study aims to analyze criminal policy and legal accountability concerning perpetrators of diploma forgery at the primary and secondary education levels, whether committed by individuals or by educational organizations/providers. It also seeks to examine the disparity between the ideal legal norms (das Sollen) and the actual implementation of law (das Sein). The research applies a normative juridical legal method, based on literature review and employing a statutory approach. The findings of this study conclude that the existing legal framework governing the criminal act of document forgery, particularly in relation to diplomas, is available and adequate. However, there exists a significant discrepancy between the legal norms and their enforcement in practice. Law enforcement authorities tend to focus predominantly on individual perpetrators, while educational organizations or institutions that play a central role in facilitating such forgeries are often excluded from criminal liability, despite the existence of clear legal provisions regulating such conduct—particularly within the context of primary and secondary education.*

**Keywords:** Criminal Policy; Legal Accountability; Forgery; Diploma.